

Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana APBDes dalam Meningkatkan Transparansi dan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes “Om Wifi” Desa Tanjung Kenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto)

Moch Habib Listyo Hermawan^{1*}, Nur Diana², Dewi Diah Fakhriyyah³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : habiblistyo@gmail.com

ABSTRACT

BUMDes are village activities to improve the village and state economy and cannot be separated from that transparency plays an important role in this case to supervise and build community trust, in this case the objectives of this study are: 1) To find out whether the accounting information system will increase transparency in government organizations at the Tanjung Kenongo Village Office, 2) To find out whether the accounting information system can improve organizational performance and whether the society is satisfied with the achievement of the system, it was found in this study that a significant accounting information system is very helpful for the performance of organizational administrators and the community, a significant system can increase transparency in Organizations and systems can significantly increase people's trust and satisfaction with the organization.

Keywords: Accounting information system, system accounting, transparency, BUMDes

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam era industri 4.0 yang hampir menuju 5.0 dengan segala perkembangannya presiden republik Indonesia bapak Joko Widodo mengatakan pada salah satu pembukaan bahwa “Pembangunan desa itu sangat penting, sejalan dengan program pemerintah yang membangun dari pinggiran” ujarnya pada Pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi 2023 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa, 26 September 2023. Sejalan dengan itu Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kepala BPIDDTT Kemendes PDTT), Ivanovich Agusta mengatakan bahwa “Sebetulnya ide dasar dari Menteri Desa PDTT yang berkaitan dengan smart village itu sangat sederhana, indikator utamanya yaitu ketika melakukan kegiatan itu berbasis data. Kemudian ketika melakukan layanan kepada masyarakat itu berbasis teknologi Informasi. Dua aspek itu sudah dimiliki seluruh desa saat ini, terutama yang sudah mengikuti proses pendataan SDGs Desa,” ujarnya pada webinar professor talk. pada Rabu (27/7/2022) dan tegaskan pula oleh beliau bahwa “SDGs Desa no 18 itu untuk budaya, institusi dan interaksi khas desa berjalan dan memayungi tujuan-tujuan pembangunan desa yang lain. Itu yang menjadi basis smart village, Desa Cerdas,” ujarnya.

Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid menegaskan bahwa “Kami berharap dapat dikelola dengan baik oleh BUMDes sebagai instrumen yang penting dalam hal ini” ujarnya. Didukung pula oleh pernyataan Presiden RI Joko Widodo pada laman resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia “Semuanya harus berani mengubah, transformasi ekonomi di desa ini sangat penting sekali. Dan BUMDesa, BUMDesa Bersama juga harus bertransformasi, tidak rutinitas, tidak menggarap hal-hal yang hanya untuk desa, tapi juga punya visi besar, bisa lari ke pasar-pasar yang lebih besar, apalagi ke pasar-pasar ekspor,” ujar pak Jokowi.

Namun Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 2.188 BUMDesa tidak beroperasi bahkan bisa disebut mati suri dan sebanyak 1.670 BUMDesa beroperasi namun belum berkontribusi terhadap pendapatan Desa,.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyebut bahwa banyak BUMDes yang tidak menyampaikan laporan, belum tertib dalam tata usaha, dan tidak diolah oleh orang – orang yang kompeten, dan BPK menambahkan pula bahwa ditemukan juga banyak sekali penyalahgunaan dana BUMDes, Maka pada dasarnya banyak BUMDes yang tidak beroperasi atau beroperasi namun tidak optimal dikarenakan kurangnya rencana usaha, Sumber daya manusia yang tidak ahli dan juga tidak efektifnya laporan.

Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa bumdes ini dapat dijalankan dengan sangat lancar apabila sistem dan kontrol didalamnya dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat menghindari berbagai kesalahan dan pelanggaran yang berpeluang terjadi karena Menurut definisi dari (Mulyadi dalam Sistem Akuntansi (2008:3)) “Sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen, guna memudahkan pengelolaan Sistem yang dilakukan secara efektif dan efisien dapat membantu Desa mencapai tujuan yang diinginkan” serta apakah sistem ini juga bisa menunjang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang keharusan adanya transparansi pada organisasi pemerintahan.

Pada penelitian ini desa yang dipilih adalah Desa Tanjung Kenongo Kabupaten Mojokerto yang berada dibawah Kecamatan Pacet dan dikelola langsung oleh Kantor Desa dibawah kepemimpinan kepala desa saat ini Bapak Ahmad Hariadi (Kepala Desa Tanjung kenongo), Alamat lengkap desa ini yakni pada Desa Tanjung Kenongo, Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto RT 01 RW 05 Jawa Timur, Kantor desa ini sudah memiliki dua bumdes yakni “Om Wifi” dan bank air desa yang telah berjalan dan kurang lebih sudah 70% masyarakat merasakan manfaatnya hal ini yang menjadikan tempat tersebut sesuai dengan kriteria BUMDes yang akan diteliti terkhusus BUMDes Om Wifi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti apakah pada implementasi dilapangan sistem sangat penting untuk pengurus desa dan masyarakat demi meningkatkan transparansi dan kinerja desa. Oleh karena itu penulis mengangkat judul EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA APBDES DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (Bumdes “Om Wifi” Desa Tanjung Kenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi pada Desa Tanjung Kenongo Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana sistem informasi akuntansi keuangan desa dalam mengembangkan Transparansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tanjung Kenongo Kabupaten Mojokerto?

Manfaat Penelitian

1. Bagi bidang keilmuan diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan melalui penelitian ini khususnya berkaitan dengan akuntansi sektor publik, sistem informasi akuntansi dan teori stewardship, (Devis & Donaldson, 1989, 1991).
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharap dapat menjadi referensi dan pengembang pada penelitian selanjutnya terkait dengan akuntansi sektor publik, evaluasi sistem informasi akuntansi ataupun teori yang sama.
3. Bagi perangkat desa Tanjung Kenongo, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dengan mendeskripsikan dasar – dasar dari sistem informasi akuntansi yang efektif sehingga dapat melihat dan mengevaluasi kesalahan – kesalahan pada sistem informasi akuntansi desa.
4. Bagi masyarakat dan pihak lain, diharap dapat menjadi gambaran bagaimana usaha desa untuk meningkatkan kinerja desa sehingga desa lebih optimal dalam meningkatkan perekonomian desa.

5. Bagi Kementerian desa PDTT. Diharap dapat menjadi saran dan pertimbangan untuk perkembangan regulasi pengelolaan keuangan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Teori Stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis (Davis & Donaldson, 1989, 1991). Teori Stewardship menggambarkan suatu keadaan dimana manajer harusnya lebih mengutamakan kepentingan kelompok/Organisasi untuk tujuan utamanya dan bukan tergerak untuk melakukan kepentingan individu. Teori Stewardship ini didasari oleh teori psikologis serta sosiologis para pemikir akuntansi manajemen, sehingga keberhasilan organisasi dapat dicapai dengan memaksimalkan, Teori Stewardship dapat berfungsi sebagai patokan pertanggung jawaban untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dicapai melalui proses pemeriksaan akuntansi yang efisien (Harryanto 2014).

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa atau masyarakat desa untuk mengelola dan mengembangkan usaha guna meningkatkan perekonomian desa. BUMDes berfungsi sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa dengan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi lokal yang ada, namun fungsi utama yakni pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal, peningkatan infrastruktur, meningkatkan kemandirian desa, dan meningkatkan kualitas hidup.

Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Bodnar & Hopwood dikutip dari Ronaldi (2012) Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah infrastruktur yang terdiri dari berbagai sumber daya, termasuk manusia dan peralatan, yang disusun secara teratur untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Informasi yang dihasilkan oleh SIA kemudian didistribusikan kepada berbagai pihak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu komponen dalam organisasi yang berfungsi mengumpulkan, mengelompokkan, menghasilkan, dan menyampaikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak eksternal, seperti inspeksi pajak, investor, dan kreditor, serta kepada pihak manajemen internal (Baridwan, 2015).

APBDesa

Anggaran pendapatan dan belanja desa atau bisa di singkat APBDes adalah rencana atau rancangan keuangan desa yang bersifat tahunan seperti yang dijelaskan pada pasal 1 PP Nomor 8 Tahun 2016 bahwasanya “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa” dan dijelaskan pula bila dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dijelaskan pada pasal 1 Nomor 2 yakni “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Laporan Keuangan Desa

Ikatan Akuntan Indonesia (2015) Mengemukakan bahwa “Laporan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang dalam penyajiannya terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas atau arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan” serta Murhadi (2019) menjelaskan pula bahwa laporan keuangan merupakan bentuk bahasa bisnis. Laporan keuangan memberikan data yang terolah

kepada pengguna tentang posisi keuangan perusahaan. Memahami laporan keuangan perusahaan memungkinkan pemangku kepentingan yang berbeda untuk memahami posisi keuangan perusahaan.

Pengelolaan Keuangan BUMDes

Dijelaskan oleh Melatyugra et, al. (2020) bahwa “BUMDesa adalah badan usaha yang berstatus badan hukum. Terkait dengan permodalan, Sebagian besar modal BUMDesa tetap harus bersumber dari desa, namun merupakan kekayaan desa yang dipisahkan” dan didampingi oleh pasal 1 nomor 14 PP Nomor 11 tahun 2021 yang berbunyi “Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil” serta ditambahkan pula pada pasal 3 poin D bahwa “BUMDesa bertujuan pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa” jadi bisa disimpulkan bahwa keuangan, aset dan nilai apapun yang bisa dinilai dengan uang pada BUMDesa berpisah dengan desa dan dikelola oleh badan BUMDesa itu sendiri namun desa tetap menjadi pemasukan modal utama dari BUMDesa itu sendiri yang bertujuan sama untuk menambah dan menciptakan nilai tambah pada desa.

Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi

Mardiasmo (2016: 134) Mengemukakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu organisasi dapat dikatakan berjalan dengan efektif apabila telah mencapai tujuan. Indikator untuk efektivitas adalah mengilustrasikan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan serta menurut Rahardjo (2011:170) menyatakan bahwa “efektivitas adalah kondisi atau keadaan dimana dalam memiliki tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan”, efektivitas di sini digunakan sebagai pengukur hasil keluaran desa apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan atau belum, dan melihat pula apakah sistem informasi akuntansi sudah berjalan seperti semestinya atau tidak sehingga dapat terlihat apakah hasil dari keluaran desa dapat menunjang bumdes dengan signifikan dan tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah Penelitian deskriptif kualitatif penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi langsung dan triangulasi data, subjek penelitian ini yang tepat menurut penulis yakni Kepala desa, Sekretaris, Pengelola BUMDes Tanjung Kenongo, serta perwakilan warga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN TEMUAN HASIL WAWANCARA

Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi

Makmur (2015) Terdapat 8 indikator pada efektivitas yakni: Ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan dalam pengukuran, ketepatan berpikir, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, ketepatan sasaran.

Hasil wawancara pertama:

Sekretaris desa bapak M. Mulyono menyampaikan bahwa:

“...pada setiap akhir tahun itu kita ada peringatan dari aplikasi dan pj serta pak kades untuk setiap pelaporan dan sampai saat ini masih belum pernah kita terlambat melakukan pelaporan, karena memang berbasis real time jadi untuk saat ini masih belum pernah ada keterlambatan dan bila ada keterlambatan belakangan ini itu dikarenakan hal hal diluar prediksi seperti bencana covid kemarin atau bencana – bencana lainnya...” lalu Kepala Desa Bapak A. Hariadi mengatakan bahwa:

“...kalau pelaporan semua sudah serba digital ya jadi pasti sistem sudah sangat tepat waktu dan kita punya target setiap akhir tahun harus selesai pelaporan, disistem itu juga semua sudah teratur menurut sistem seperti target, panduan dari pj dan output laporan, perihal sistem informasinya lebih detail bisa ditanyakan ke mas alif ya tapi menurut sepengetahuan saya belum pernah mengalami kendala salah input atau bahkan mengalami keterlambatan bila ada pasti itu dari kami karena adanya masalah seperti bencana alam atau lainnya...”

Hasil wawancara kedua:

Bapak M. Mulyono didalam wawancaranya beliau menyampaikan bahwa:

“...ketepatan hasil perhitungan itu sesuai sama penggunaan mas kalau input sudah sesuai ya pasti tepat karena disistem setelah input sistem otomatis memproses, saya juga sering melakukan ceking pada output sistem dan yang saya lihat hasil dari sistem tepat seperti yang saya hitung manual, jadi insyaallah sudah sesuai...” selaras dengan pernyataan bapak A. Hariadi

Hasil wawancara ketiga:

Hasil wawancara ketiga ini Kepala Desa Bapak Ahmad Hariadi menyampaikan bahwa:

“...kalau perihal laporan apa saja yang dibutuhkan itu ya output laporan aset, laporan perkembangan pembangunan, laporan anggaran, dan pasti laporan akuntansi perihal penerimaan dan pengeluaran, laporan – laporan itu sudah ada pada sistem namun masih terpisah – pisah, seperti aset masih di sistem sipades, masalah anggaran masih disiskeudes jadi masih belum ada yang satu mencakup semuanya...” Selaras dengan hasil observasi serta wawancara dengan Bapak Alif selaku kasi pemerintahan

Hasil wawancara keempat:

Bapak Ahmad Hariadi bahwa pengambilan keputusan juga menggunakan output dari sistem sebagai acuan, tanggapan tersebut sebagai berikut: “...kalau pengambilan keputusan itu di sini selalu menggunakan banyak hal sebagai dasar, seperti contohnya ketika ada rapat pengambilan keputusan saya mengumpulkan semua perangkat desa, para tetua, perwakilan anak muda desa, pengawas desa, dan pendamping desa dari kecamatan, dan bahan kami rapat dari output sistem keuangan, laporan aset dan laporan keuangan pastinya...” pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan sekretaris dan perwakilan masyarakat yang mengikuti rapat rutin

Hasil wawancara kelima:

Bapak Muhamad Mulyono yang menjelaskan juga bahwa:

“...kalau semua pagu itu sebenarnya sudah ada mas di sistem, kalau ada yang salah atau kelebihan nominal yang ditetapkan pada awal tahun itu gak bisa dimasukkan mas, jadi kami bakal input ulang kalau sudah benar dan juga di setiap aplikasi itu ada penanggung jawabnya masing – masing itu juga membantu kami sangat...”

Hasil wawancara keenam:

Menurut Bapak Muhamad Mulyono sebagian besar sudah disediakan oleh sistem, keterangannya sebagai berikut:

“...sebagian sudah ada mas, seperti output laporan keuangan pertahun dan data – data ditahun sebelumnya pun terkadang masih bisa diakses, namun jika perihal pergantian anggaran itu masih belum bisa segampang itu mas, kalau laporan salah itu kami baru bisa menggantinya ditahun berikutnya, jadi itu kenapa setiap laporan kami teliti sedetail mungkin...” yang juga selaras dengan pernyataan bapak A. Hariadi.

Hasil wawancara ketujuh:

Bapak Ahmad Hariadi menyampaikan bahwa: “...menurut saya sudah sesuai ya, karna sistem sudah menyampaikan informasi yang dapat dilihat oleh masyarakat, perangkat desa dan kecamatan serta pemerintahan pusat, jadi data sudah tersampaikan secara merata...”.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada perwakilan warga ibu Susi Fitrianiingsih apakah sistem informasi memang sudah tersampaikan dan dilihat oleh warga aktif, tanggapannya seperti berikut:

“...kalau data keuangan desa saya sering melihat mas, kalau perihal itu sudah bisa kok mas dilihat pada laman desa, kadang saya juga lihat tahun ini sudah terpakai pada pembangunan apa saja dan apakah pengeluaran sesuai apa tidak, karna kadang saya penasaran...”.

Hasil wawancara kedelapan:

kepala desa Bapak Ahmad Hariadi menyampaikan bahwa masih perlu pengembangan dan proses lebih lanjut, tanggapan beliau seperti berikut: “...Menurut saya sudah sesuai, tapi masih perlu banyak perbaikan, karna itu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan tentunya...”

Analisis Transparansi Pada Sistem Desa

Menurut Mulyaningsih (2019:7) dikutip dari Purwanti (2021) bahwa transparansi pada sistem dapat diukur dari empat indikator yakni adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen, adanya kejelasan dan kelengkapan informasi, adanya keterbukaan proses, dan adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Hasil wawancara pertama:

perwakilan warga ibu Susi Fitriyaningsih menyampaikan bahwa:

“...detail anggaran itu biasanya desa mengadakan rapat gitu mas, suami saya terkadang menghadiri rapat tersebut dan kemarin waktu masa covid itu juga disampaikan oleh desa ada bantuan dan siapa saja yang mendapat bantuan itu dicetak dibanner gitu mas, jadi kalau masalah informasi anggaran kalau memang ingin mencari tahu, mudah sebenarnya mas dan ada juga wes resminya lengkap diinput disana...” selaras dengan pernyataan bapak A. Hariadi

Hasil wawancara kedua:

Muhamad Mulyono menjabarkan bahwa:

“...kalau data – data sudah sangat jelas mas disampaikan waktu rapat bersama warga, selain itu semua sudah ada pada laman kami perihal APBdes, kegiatan, index desa juga ada diweb kami...”

Hasil wawancara ketiga:

Bapak ahmad Hariadi menjabarkan bahwa:

“...kami juga menempelkan sepanduk – sepanduk kalau ada pembagian bantuan, kami juga mengadakan rapat – rapat itu juga membahas tentang pembangunan apa saja yang akan kami kerjakan dan yang sudah terselenggara, kadang ada tiba – tiba bencana tidak terduga seperti genset meledak, atau pompa sumur meledak itu kami juga menginformasikan ke warga kalau dana akan diturunkan untuk itu juga, jadi warga selalu ikut dalam proses kami...” dan Selaras dengan pernyataan tersebut ibu Susi Fitriyaningsih menjabarkan pula bahwa pada era covid tahun lalu penerima bantuan terpampang pada spanduk siapa saja yang menerima bantuan dan suami dari ibu Susi juga sering mendatangi rapat rutin desa

Hasil wawancara keempat:

pada indikator ini sebenarnya kerangka regulasi sudah diatur oleh berbagai peraturan pemerintah yang menjamin transparansi, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 serta peraturan pemerintah sebagai kerangka regulasi sudah sangat lengkap mewadahi hak kita terkait transparansi desa.

Analisis Perkembangan Kinerja Pada BUMDes

Pada indikator ini peneliti menemukan dalam hasil wawancaranya bersama empat perwakilan warga, ditemukan hasil bahwa kinerja BUMDes mengalami peningkatan yang signifikan seperti kecepatan wifi, metode pembayaran, layanan gangguan dan kualitas wifi perwakilan warga selaras menjawab bahwa mereka puas dengan semua itu dan mereka merasakan perkembangan pada BUMDes namun masih harus dikembangkan.

PEMBAHASAN

Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi

Pada indikator pertama berdasarkan hasil wawancara pertama tentang efektivitas adalah ketepatan waktu telah sesuai karena sistem informasi desa dapat menghasilkan laporan tepat waktu karna berbasis real time dan pasti akan sesuai dengan tenggang waktu yang

ditetapkan lalu pada indikator ketepatan perhitungan biaya selaras dengan hasil wawancara kedua telah sesuai karena laporan pada sistem dan laporan ketika manual sesuai pada penjabaran dikatakan pula bahwa semisal terjadi kesalahan maka kesalahan pasti terletak pada penginput data, dijelaskan pula bahwa sistem yang dipakai oleh desa semua sudah memiliki rumusnya sendiri dan teratur menurut sistem.

Pada indikator ketepatan dalam pengukuran sesuai dengan hasil wawancara ketiga sudah sesuai karena desa memerlukan laporan perihal laporan aset, laporan anggaran dan laporan akuntansi perihal pengeluaran serta pemasukan dan itu sudah disediakan oleh sistem yang digunakan oleh desa saat ini, walaupun sistem – sistem tersebut masih terpisah lalu pada indikator ketepatan berpikir selaras dengan hasil wawancara keempat sudah sesuai karena apabila penginputan laporan melebihi pagu yang ditetapkan dan disepakati diawal maka desa tidak dapat menginput datanya, ini menjadi cara sistem memberitahu bahwa terjadi kelebihan yang luar biasa dan pada setiap sistem juga terdapat penanggung jawabnya masing – masing dari kecamatan sehingga ketepatan pada sistem juga ditunjang oleh penanggung jawab setiap sistem.

Pada indikator ketepatan dalam penentuan pilihan sesuai dengan hasil wawancara kelima sudah sesuai karena output sistem selalu menjadi poin penting pada saat diskusi pengambilan keputusan atau rapat rutin Bersama warga dan pada indikator ketepatan dalam melakukan perintah sesuai dengan hasil wawancara keenam sudah sesuai karna bila desa ingin melihat hasil laporan keuangan sistem bisa memberikan

Pada indikator ketepatan dalam menentukan tujuan berdasarkan hasil wawancara ketujuh sistem informasi desa Tanjung Kenongo sudah sesuai sebagai sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi pada desa Tanjung Kenongo sudah menjadi media informasi yang menyampaikan informasi kepada kecamatan, perangkat desa dan masyarakat umum

Pada indikator terakhir yakni ketepatan sasaran sesuai dengan hasil wawancara kedelapan menurut kepala desa Tanjung Kenongo Bapak Ahmad Hariadi sudah sesuai karena sudah memenuhi apa yang diharapkan oleh desa dan sudah menjadi media penyedia informasi yang digunakan oleh desa sebagai bahan untuk pengambilan keputusan serta media informasi bagi pemerintahan lebih tinggi atau bagi masyarakat yang ingin mengetahui program dan pengelolaan dana oleh desa maka bisa ditarik kesimpulan dengan melihat indikator yang dipaparkan oleh makmur (2015) maka sistem informasi akuntansi pada desa ini bisa dikatakan efektif dan sudah sesuai harapan meski masih ada yang perlu dikembangkan.

Transparansi Informasi Desa

Berdasarkan temuan pada hasil wawancara di atas, sudah dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator telah sesuai seperti yang diuraikan oleh Mulyaningsih (2019:7) dikutip dari Purnawati (2021) dan juga warga negara sudah difasilitasi pula oleh (PP) No 60 Tahun 2014 dan Undang – Undang No 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi,

Perkembangan Kinerja BUMDes

Pada poin ini dari hasil wawancara ke-empat narasumber didapati hasil bahwa warga merasakan perkembangan yang signifikan pada kinerja bumdes dan juga masyarakat merasa puas terhadap biaya wifi yang dikeluarkan oleh desa namun tetap ditemukan juga bahwa pembayaran masih secara manual dan masyarakat berpendapat bahwa masih bisa dikembangkan lagi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bisa disimpulkan bahwa semua sudah sesuai dengan teori yang dipakai oleh peneliti yakni teori stewardship karena ketua organisasi sudah mengesampingkan kepentingan pribadinya dan lebih mementingkan kepentingan kelompok, dapat dilihat dalam setiap pengambilan keputusan pemimpin organisasi yang dimaksud di sini adalah kepala desa beliau telah melibatkan setiap unsur warga untuk pengambilan keputusan dan perencanaan sehingga kepentingan organisasi selalu menjadi prioritas kelompok.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Sistem informasi akuntansi desa Tanjung Kenonggo sudah cukup efektif dalam penggunaannya, dikarenakan sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh desa dan sudah memenuhi indikator – indikator yang dikemukakan oleh Makmur (2015).
2. Transparansi pada desa Tanjung Kenonggo sudah cukup sesuai dengan beberapa ketentuan yang dijabarkan oleh Mulyaningsih (2019:7) yang peneliti kutip dari purnawati (2021) menjabarkan bahwa indikator dari tercapainya transparansi adalah ketersediaan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Berdasarkan indikator di atas dan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua indikator sudah berjalan sesuai dan selaras dengan peraturan – peraturan desa.
3. Sistem sudah menunjang dengan signifikan dilihat dalam pengukuran indikator – indikator transparansi, sistem selalu menjadi poin yang tidak pernah terlewatkan mulai dari perwakilan warga atau bahkan perangkat desa serta terbukti pula bahwa laman resmi desa menjadi poin yang tidak pernah tertinggal selama wawancara Bersama kepala desa, sekretaris atau pun warga, dengan tidak langsung warga sudah bisa dibilang sangat terbantu terhadap akses data melalui laman resmi desa tersebut.
4. Mekanisme BUMDes sudah menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan, biaya, pelayanan dan kualitas wifi menjadi nilai penting kepuasan masyarakat yang sudah berhasil dibawakan oleh desa namun tentu masih ada yang perlu dikembangkan seperti mekanisme pembayaran yang bisa dikembangkan.

Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Subjek penelitian atau bisa disebut informan masih terbilang terbatas yakni hanya mencakup kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan, perwakilan warga aktif, sehingga peneliti tidak mendapatkan banyak sisi pandang.
2. Keterbatasan ruang lingkup yang terbatas hanya pada satu desa, yang bisa dikatakan kurang luas dan tidak ada pembandingan pada proses desa dengan lainnya.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dilampirkan di atas maka peneliti memberikan sarana sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas jangkauan informan yang akan diwawancara, dengan seperti itu peneliti akan menerima berbagai macam sudut pandang yang berbeda sehingga penelitian akan lebih mendapat tolak ukur yang beragam.
2. Bagi peneliti selanjutnya bila mendapatkan kasus lain yang cukup baru dan hangat diperbincangkan maka lakukan observasi terlebih dahulu apakah penelitian akan membahas hal sensitif atau tidak, sehingga peneliti akan mudah mendapatkan ketersediaan informan dengan jangkauan lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arista, W. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Wonongan Kabupaten Pasuruan). Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Baridwan, Z. (2015). *Sistem informasi akuntansi*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, R. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20-47.

- Dewi, Y. A., Nasfi., & Yuliza. M. (2021). Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Desa.
- Fahmi, I. (2017). Analisis Laporan Keuangan (6ed.). Bandung: Alfabeta.
- Harryanto, Kartini, Haliah.2014. Budget Process of Local Government in Indonesia. Review of Integrative Business & Economics Research Vol 3 (2),483-501.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa , Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(4), 1–15.
- Indrawati, S. M. (2017). Buku Pintar Dana Desa, Jakarta: Kementerian Keuangan. Republik Indonesia.
- Kriyantono, R. (2018). Kearifan Lokal dan Strategi Komunikasi Public Relations di BUMN dan Perusahaan Swasta. Jurnal Ilmu Komunikasi, 15(2), 171–188.
<https://doi.org/10.24002/jik.v15i2.1480>
- Lubis, N., Kamilah and Yanti, N. (2023) ‘Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (Sia) Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa, Lumban Dolok, Kec. Siabu, Kab. Mandaling Natal)’, *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), pp. 367–376.
- Makmur. (2015). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT Refika Aditama, 6 – 8.
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murhadi, W. R. (2019). Analisis Laporan Keuangan : Proyeksi dan Valuasi Saham. Jakarta : Salemba Empat
- Nugroho, A.T. *et al.* (2022) ‘PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA’, *Edunomika - Vol. 06, No. 02, 2022*
- Pramelani, P., & Lestari, A. (2019). Program Employee Gathering “Satukan Hati Selaraskan Tujuan” Dalam Menjalin Hubungan Baik Karyawan. Jurnal Komunikasi, 10(1), 42–47.
<https://doi.org/10.31294/jkom.v10i1.5096>
- Purwanti, Umi. (2021). TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MELILIAN KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM. : Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)
- Rahardjo & Adisasmita. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Cetak Pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ronald. H. (2012). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. Jurnal Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Vol. 1 (3), Mei. Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Unika Widya Mandala Surabaya.
- Sahusilawane. W. (2014). Pengaruh Partisipasi Pemakai dan Dukungan Atasan terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada Bank Umum Pemerintah. Jurnal Organisasi dan Manajemen. Vol. 10 (1). Maret. Fakultas Terbuka. Zaki Baridwan. 2004. *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan, BPFE. Yogyakarta
- Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Spi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(4), 330-342.
- Wahyuni, S., Indrawati, N., & Al Azhar, A. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu.
Jurnal ekonomi.

- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88-98.
- Yulianti, Widia, Kamaliah, & Rasuli. (2018). Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.